



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 332 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022;

5. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 121/KEP/G3/2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Pusat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Kementerian Agama merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 332 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022.
- KELIMA : Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana merujuk pada Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 121/KEP/G3/2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- KEENAM : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KETUJUH : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh masing – masing Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing – masing Pemerintah Pusat.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN XXXV
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 544 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA/ASKOR KAMAR AGAMA
2.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	1	0	PANITERA MUDA/ASKOR KAMAR PERDATA
3.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA PERDATA
4.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS
5.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	1	0	PANITERA MUDA/ASKOR KAMAR PIDANA
6.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA MILITER
7.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA KAMAR/ASKOR KAMAR PENGAWASAN
8.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS
9.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA PERDATA AGAMA
10.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	1	0	PANITERA MUDA/ASKOR KAMAR TATA USAHA NEGARA
11.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA PIDANA
12.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA KAMAR/ASKOR KAMAR PEMBINAAN
13.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA/ASKOR KAMAR MILITER
14.	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 SYAR'ITYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'ITYAH/MUAMALAH)	2	0	PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
15.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
16.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
17.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
18.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
19.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA
20.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SINJAI
21.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
22.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
23.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
24.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
25.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP
26.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
27.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
28.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
29.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
30.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
31.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
32.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
33.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TARAKAN
34.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI POSO
35.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BATAM
36.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI
37.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
38.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA POSO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
39.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI
40.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LAHAT
41.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TAHUNA
42.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI RENGAT
43.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
44.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DEMAK
45.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
46.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
47.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
48.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG
49.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CIAMIS
50.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
51.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MATARAM
52.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JEMBER
53.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CILACAP
54.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
55.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
56.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANTUL
57.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
58.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
59.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TEGAL
60.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
61.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
62.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CIBADAK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
63.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINJAI
64.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
65.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
66.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
67.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
68.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MEDAN
69.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PASARWAJO
70.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
71.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MANADO
72.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SEKAYU
73.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUWAWA
74.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN
75.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PASURUAN
76.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
77.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LASUSUA
78.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
79.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TAIS
80.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWODADI
81.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN
82.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AMBON
83.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
84.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BITUNG
85.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK
86.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BATURAJA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
87.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG
88.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG
89.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SERANG
90.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CURUP
91.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
92.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TONDANO
93.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
94.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
95.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
96.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG
97.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
98.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
99.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
100.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI NGAWI
101.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
102.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAKALE

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
103.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA
104.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TUBAN
105.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
106.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAGETAN
107.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
108.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUMBER
109.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
110.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
111.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
112.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TONDANO
113.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
114.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
115.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
116.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
117.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JANTHO
118.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
119.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
120.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
121.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
122.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
123.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK
124.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SENGETI
125.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
126.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI BEKASI

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
127.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
128.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PARE-PARE
129.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
130.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
131.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MATARAM
132.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TALIWANG
133.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN
134.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
135.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
136.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
137.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WATES
138.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SUBANG
139.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
140.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
141.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PANCAJENE
142.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
143.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
144.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
145.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SAWAH LUNTO
146.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
147.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
148.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI UNGARAN
149.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
150.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKALE

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
151.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUN
152.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID
153.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
154.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TERNATE
155.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SAMPTI
156.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR
157.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA AMPANA
158.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
159.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBON
160.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KENDARI
161.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PADANG
162.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MANADO
163.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG
164.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
165.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
166.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIGLI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
167.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
168.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
169.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUMBER
170.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANGKO
171.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI DUMAI
172.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG
173.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG
174.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANTUL

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
175.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
176.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BLITAR
177.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
178.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SRAGEN
179.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA TATA USAHA MILITER PENGADILAN MILITER UTAMA
180.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
181.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
182.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
183.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
184.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
185.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
186.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
187.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JOMBANG
188.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUNGKID
189.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA GORONTALO
190.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SELONG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
191.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MANADO
192.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
193.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
194.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LAHAT
195.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGKO
196.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
197.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIREBON
198.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
199.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MAROS
200.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
201.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA STABAT
202.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LIWA
203.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID
204.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR
205.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
206.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
207.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
208.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
209.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BENGKULU
210.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
211.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA RAHA
212.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
213.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUWUK
214.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
215.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TAKENGON
216.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
217.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
218.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PURWODADI
219.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KAJEN
220.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
221.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
222.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
223.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS
224.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA DONGGALA
225.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
226.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBAN
227.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
228.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TERNATE
229.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
230.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
231.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DENPASAR
232.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
233.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
234.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CIANJUR
235.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI POLEWALI
236.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
237.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KLATEN
238.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
239.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI CILACAP
240.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
241.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAJENE
242.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG
243.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA NEGARA
244.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LEMBATA
245.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
246.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
247.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKIT TINGGI
248.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KISARAN
249.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
250.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PACITAN
251.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
252.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUMENEP
253.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
254.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MARISA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
255.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
256.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
257.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
258.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
259.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TUAL
260.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
261.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP
262.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
263.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SORONG
264.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
265.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI DEPOK
266.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
267.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
268.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BEKASI
269.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI SURABAYA
270.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
271.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
272.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUMEDANG
273.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS
274.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYAR'YAH BIEREUN
275.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
276.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
277.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI
278.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JOMBANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
279.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUMBER
280.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
281.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
282.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
283.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MANOKWARI
284.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
285.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
286.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
287.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA GORONTALO
288.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
289.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
290.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SRAGEN
291.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
292.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYARI'YAH LHOKEUMAWA
293.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
294.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CIAMIS

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
295.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ENDE
296.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI SURABAYA
297.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PINRANG
298.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAMBI
299.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MANOKWARI
300.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDINGPENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
301.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
302.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BARABAI

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
303.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PADANG
304.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BLITAR
305.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
306.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
307.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
308.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
309.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUKADANA
310.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
311.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NABIRE
312.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN
313.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO
314.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARAPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
315.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
316.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SANGGAU
317.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
318.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KAIMANA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
319.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
320.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
321.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BOGOR
322.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
323.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
324.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SAMPIT
325.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
326.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JEPARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
327.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
328.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TONDANO
329.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
330.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
331.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BINJAI
332.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
333.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PALU
334.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOLAKA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
335.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
336.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
337.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
338.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
339.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
340.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA METRO
341.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGGAU
342.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
343.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
344.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG
345.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA
346.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
347.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI NEGARA
348.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LUWUK
349.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
350.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NAMLEA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
351.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
352.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN
353.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KARAWANG
354.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
355.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
356.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
357.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
358.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
359.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
360.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SLAWI
361.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUBANG
362.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKADANA
363.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
364.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB MADIUN
365.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI UNGARAN
366.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
367.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
368.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
369.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
370.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KEPAHANG
371.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUMPENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU
372.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA DEMAK
373.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
374.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUMPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
375.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
376.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON
377.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
378.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MANINJAU
379.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SELONG
380.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN
381.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MALLI
382.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BADUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
383.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
384.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI NGANJUK
385.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
386.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
387.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
388.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJAR
389.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
390.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
391.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
392.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SOLOK
393.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
394.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
395.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
396.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUBANG
397.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKO
398.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MASAMBA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
399.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI CILACAP
400.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
401.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA BARU
402.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
403.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CIKARANG
404.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SERANG
405.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
406.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MANNA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
407.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KENDAL
408.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
409.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTOBARU
410.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
411.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
412.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGIL
413.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SLAWI
414.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
415.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUDUS
416.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
417.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SOA SIO
418.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KISARAN
419.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MEDAN
420.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SORONG
421.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
422.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
423.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
424.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN
425.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA ANDOOL
426.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS
427.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANTAENG
428.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI REMBANG
429.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
430.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
431.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
432.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
433.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GARUT
434.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
435.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SENGKANG
436.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU
437.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
438.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
439.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
440.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
441.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTA
442.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SENGKANG
443.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK
444.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PALU
445.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
446.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
447.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MENGGALA
448.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
449.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB
450.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUBANG
451.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
452.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
453.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN
454.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
455.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
456.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
457.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
458.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
459.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PARE-PARE
460.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
461.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN
462.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI BATAM

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
463.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
464.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
465.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
466.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SALATIGA
467.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI
468.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG
469.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
470.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BINJAI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
471.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
472.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TUBAN
473.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
474.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMPIT
475.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG
476.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI KLATEN
477.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
478.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
479.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
480.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
481.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
482.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SELAYAR
483.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KISARAN
484.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LUWUK
485.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
486.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BATURAJA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
487.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
488.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BREBES
489.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUPANG
490.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
491.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BREBES
492.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUNAN
493.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
494.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MUARO BUNGO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
495.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KALIANDA
496.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANDAN
497.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
498.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
499.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
500.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MALINAU
501.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG
502.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
503.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TUTUYAN
504.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI
505.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
506.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
507.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PADANG
508.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BOGOR
509.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
510.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGIL

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
511.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JEMBER
512.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
513.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
514.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
515.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
516.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
517.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI
518.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
519.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SANGATA
520.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI STABAT
521.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
522.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
523.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUMENEP
524.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
525.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
526.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
527.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
528.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
529.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PEMALANG
530.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
531.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
532.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA RENGAT
533.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN
534.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI TANJUNGPANDAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
535.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KALABAHI
536.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
537.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
538.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
539.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG
540.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KALLANDA
541.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
542.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAGELANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPP	
543.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RUTENG
544.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
545.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI STABAT
546.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG
547.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
548.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SENGETI
549.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
550.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
551.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SENGETI
552.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK
553.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PALOPO
554.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
555.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG
556.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KENDARI
557.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
558.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMBAS

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
559.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
560.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
561.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
562.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PONOROGO
563.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BATU LICIN
564.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN
565.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PENAJAM
566.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
567.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
568.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAMBI
569.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MUNGKID
570.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
571.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RANTAU
572.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CILACAP
573.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
574.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
575.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
576.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAMUJU
577.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KENDAL
578.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR
579.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
580.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
581.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
582.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
583.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
584.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BOGOR
585.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS
586.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
587.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PINRANG
588.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CILACAP
589.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI DEMAK
590.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
591.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI BANDUNG
592.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
593.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KALIANDA
594.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KEDIRI
595.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
596.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SENGKANG
597.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
598.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
599.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BARRU
600.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WATES
601.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GARUT
602.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SOREANG
603.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
604.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
605.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
606.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI DEPOK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
607.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
608.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
609.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA POLEWALI
610.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
611.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KWANDANG
612.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
613.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
614.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI DUMAI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
615.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
616.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CALANG
617.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BLORA
618.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
619.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA WATES
620.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BATAM
621.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PEMALANG
622.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
623.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
624.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA NGAWI
625.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
626.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN
627.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BLORA
628.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
629.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
630.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
631.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BITUNG
632.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
633.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
634.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA METRO
635.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
636.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
637.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KENDARI
638.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYARIAH SIGLI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
639.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
640.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PATI
641.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SAMPANG
642.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KAB MALANG
643.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BITUNG
644.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
645.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
646.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
647.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAMPANG
648.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BREBES
649.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAMBI
650.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANG
651.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
652.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGATA
653.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PATI
654.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
655.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN
656.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BARRU
657.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
658.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BENGKULU
659.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
660.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUMBER
661.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
662.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BAWEAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
663.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
664.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI
665.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
666.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PINRANG
667.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
668.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
669.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JOMBANG
670.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
671.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI
672.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
673.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI WATES
674.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
675.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TEGAL
676.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANTAENG
677.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SOLOK
678.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
679.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BEKASI
680.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
681.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI CIAMIS
682.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SLAWI
683.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KUPANG
684.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
685.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT
686.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUTACANE

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
687.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
688.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CIAMIS
689.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
690.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO
691.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KARAWANG
692.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
693.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
694.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
695.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
696.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE
697.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
698.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON
699.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
700.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PEMALANG
701.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KETAPANG
702.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI UNAAHA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
703.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PACITAN
704.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DEPOK
705.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
706.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PONOROGO
707.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
708.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
709.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG
710.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
711.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KUPANG
712.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
713.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
714.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KENDARI
715.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
716.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
717.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANGERANG
718.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
719.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI IDI
720.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MATARAM
721.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
722.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TAHUNA
723.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
724.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SORONG
725.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
726.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SOA SIO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
727.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
728.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CURUP
729.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
730.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KENDAL
731.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYARIAH KOTA SUBULUSSALAM
732.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
733.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
734.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI METRO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
735.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
736.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
737.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
738.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
739.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA GRESIK
740.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
741.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KAB MADIUN
742.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BITUNG

sa

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
743.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA BARU
744.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
745.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID
746.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
747.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
748.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BUNGKU
749.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
750.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
751.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
752.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
753.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
754.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR
755.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DONGGALA
756.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CILACAP
757.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
758.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
759.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
760.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
761.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
762.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
763.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI DUMAI
764.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
765.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PAINAN
766.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SORONG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
767.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS PERIKANAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
768.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SERANG
769.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
770.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
771.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
772.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
773.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
774.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
775.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
776.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG
777.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
778.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN
779.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
780.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TEGAL
781.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NGABANG
782.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BINJAI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
783.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
784.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAMBI
785.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BALIGE
786.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
787.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
788.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA DUMAI
789.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI DENPASAR
790.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KALABAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
791.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LABUHA
792.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
793.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
794.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
795.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI
796.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
797.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA STABAT
798.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KENDAL

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
799.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAGETAN
800.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
801.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
802.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WAMENA
803.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI DONGGALA
804.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
805.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
806.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PATI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
807.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
808.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CIREBON
809.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MEDAN
810.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO
811.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGATA
812.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
813.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
814.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BAJAWA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
815.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI FAK-FAK
816.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MASAMBA
817.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
818.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MEDAN
819.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN
820.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
821.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
822.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PALOPO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
823.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPURA
824.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUBANG
825.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGGAI
826.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SO'E
827.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BLITAR
828.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
829.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI
830.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
831.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MASOHI
832.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARADUA
833.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BATU LICIN
834.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PALU
835.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUPANG
836.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
837.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PATI
838.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
839.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
840.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
841.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
842.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
843.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
844.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
845.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BATAM
846.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
847.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
848.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BEKASI
849.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
850.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BEKASI
851.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
852.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PURWODADI
853.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN
854.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
855.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
856.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BENGKULU
857.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TAIS
858.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
859.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LOLAK
860.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI POLEWALI
861.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
862.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
863.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
864.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN MILITER TINGGI - III SURABAYA
865.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI KUPANG
866.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
867.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
868.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN MILITER UTAMA
869.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SLAWI
870.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
871.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SENGKANG
872.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
873.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI AMURANG
874.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
875.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
876.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
877.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
878.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
879.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
880.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG
881.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
882.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
883.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
884.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
885.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BREBES
886.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
887.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DOMPU
888.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA
889.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG
890.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI MEDAN
891.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI DEMAK
892.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
893.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
894.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
895.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
896.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOGOR
897.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG
898.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
899.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
900.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
901.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
902.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
903.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PATI
904.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CILEGON
905.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKULU
906.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
907.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BINJAI
908.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAUMERE
909.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
910.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA FAK-PAK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
911.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
912.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI DUMAI
913.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
914.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI
915.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
916.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
917.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR
918.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CIREBON

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
919.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
920.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
921.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
922.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
923.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
924.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAMBAS
925.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TUBAN
926.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
927.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG
928.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LAHAT
929.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
930.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MALANG
931.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE
932.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GIANYAR
933.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BIMA
934.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
935.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYAR' IYAH BLANGPIDIE
936.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
937.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
938.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SAMPANG
939.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
940.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI OELAMASI
941.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA
942.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
943.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
944.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
945.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDINGPENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
946.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
947.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KOLAKA
948.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KENDAL
949.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG
950.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PRAYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
951.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG
952.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
953.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
954.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI GORONTALO
955.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
956.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
957.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI WATES
958.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MENTOK

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
959.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SENGKANG
960.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
961.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
962.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
963.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KENDARI
964.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
965.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
966.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJAR BARU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
967.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
968.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
969.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
970.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
971.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU
972.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KANGEAN
973.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MEULABOH
974.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
975.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI RENGAT
976.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
977.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TAKALAR
978.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MATARAM
979.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
980.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CIREBON
981.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BAU-BAU
982.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
983.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
984.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
985.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
986.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU
987.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MAKALE
988.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
989.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
990.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NABIRE

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
991.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
992.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PALU
993.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI OELAMASI
994.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BREBES
995.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
996.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
997.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JEMBER
998.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
999.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
1000.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
1001.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
1002.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI KENDARI
1003.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI JAKARTA
1004.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
1005.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR
1006.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA AMBON

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1007.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JEPARA
1008.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
1009.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
1010.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
1011.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KRUI
1012.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
1013.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
1014.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1015.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
1016.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI MEDAN
1017.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAWAH LUNTO
1018.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
1019.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PURWODADI
1020.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
1021.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
1022.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1023.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
1024.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
1025.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
1026.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
1027.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG
1028.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BATURAJA
1029.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI STABAT
1030.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1031.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BATAM
1032.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
1033.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA STABAT
1034.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BONTANG
1035.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA REMBANG
1036.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
1037.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PATI
1038.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1039.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
1040.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG
1041.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SERANG
1042.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SABANG
1043.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIAMIS
1044.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG
1045.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BLORA
1046.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1047.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GRESIK
1048.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
1049.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
1050.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIM
1051.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
1052.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
1053.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
1054.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA RENGAT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1055.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BLITAR
1056.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
1057.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN
1058.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
1059.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUNAN
1060.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA TATA USAHA MILITER PENGADILAN MILITER TINGGI - III SURABAYA
1061.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TARAKAN
1062.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1063.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BATURAJA
1064.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
1065.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR
1066.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA NGAWI
1067.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JEPARA
1068.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
1069.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
1070.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LUWUK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1071.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
1072.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
1073.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BUOL
1074.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
1075.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PALU
1076.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
1077.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TABANAN
1078.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI METRO

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1079.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
1080.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI AMBON
1081.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
1082.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
1083.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BEKASI
1084.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
1085.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MANADO
1086.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI BANTEN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1087.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
1088.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SANGATTA
1089.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
1090.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA DOMPU
1091.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TABANAN
1092.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
1093.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
1094.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1095.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
1096.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TAHUNA
1097.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
1098.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PRAYA
1099.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NEGARA
1100.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
1101.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TEGAL
1102.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA GARUT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1103.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
1104.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA TATA USAHA MILITER PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN
1105.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BELOPA
1106.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TERNATE
1107.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
1108.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI CIREBON
1109.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
1110.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1111.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
1112.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
1113.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KLATEN
1114.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
1115.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
1116.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
1117.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TERNATE
1118.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPFK	
1119.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLTIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIANJUR
1120.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KAB MALANG
1121.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI DONGGALA
1122.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ANDOOL
1123.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
1124.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI ENREKANG
1125.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
1126.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PALU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1127.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NGAWI
1128.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI
1129.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
1130.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAGETAN
1131.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
1132.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
1133.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
1134.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1135.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
1136.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGLI
1137.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR
1138.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MENGALA
1139.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LABUHA
1140.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
1141.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
1142.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1143.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
1144.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SAMPIT
1145.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SELONG
1146.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MADIUN
1147.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BALIGE
1148.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
1149.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
1150.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1151.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BONTANG
1152.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JEMBER
1153.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SEKAYU
1154.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
1155.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MALANG
1156.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
1157.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
1158.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1159.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
1160.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANTUL
1161.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
1162.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOLAKA
1163.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL
1164.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
1165.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PALOPO
1166.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1167.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
1168.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
1169.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
1170.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
1171.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CURUP
1172.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
1173.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWA
1174.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1175.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MERAUKE
1176.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
1177.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG
1178.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
1179.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN
1180.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
1181.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KEDIRI
1182.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1183.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN
1184.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CIANJUR
1185.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
1186.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SLAWI
1187.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
1188.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAU
1189.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU
1190.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1191.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIBADAK
1192.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
1193.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
1194.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
1195.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
1196.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
1197.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
1198.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1199.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MADIUN
1200.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CIBINONG
1201.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI CIBADAK
1202.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
1203.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
1204.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
1205.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KISARAN
1206.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1207.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA CILACAP
1208.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GRESIK
1209.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA DEPOK
1210.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PAINAN
1211.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
1212.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU
1213.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
1214.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1215.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PALOPO
1216.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN
1217.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG
1218.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
1219.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDINGPENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU
1220.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
1221.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MARISA
1222.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1223.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA RANTAU
1224.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MALILI
1225.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
1226.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA REMBANG
1227.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BATANG
1228.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
1229.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
1230.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1231.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
1232.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
1233.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA GARUT
1234.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
1235.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
1236.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUBANG
1237.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SALATIGA
1238.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGADILAN NEGERI SURABAYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1239.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
1240.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KARAWANG
1241.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
1242.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
1243.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MATARAM
1244.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN
1245.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
1246.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1247.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
1248.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAGELANG
1249.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
1250.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LAHAT
1251.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
1252.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SUMBER
1253.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
1254.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1255.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KARAWANG
1256.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
1257.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINABANG
1258.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA RUMBIA
1259.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
1260.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
1261.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
1262.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1263.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
1264.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
1265.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
1266.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK
1267.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAROS
1268.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
1269.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
1270.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT		0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1271.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TUBAN
1272.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
1273.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
1274.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI JAKARTA
1275.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI PADANG
1276.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
1277.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKADANA
1278.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1279.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGLI
1280.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PACITAN
1281.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
1282.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU
1283.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR
1284.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MIMIKA
1285.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG
1286.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TAKALAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1287.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGIL
1288.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
1289.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
1290.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
1291.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
1292.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARAPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
1293.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JEPARA
1294.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1295.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
1296.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NATUNA
1297.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
1298.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA BARU
1299.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
1300.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KLATEN
1301.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BATAM
1302.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1303.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
1304.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
1305.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA
1306.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAROS
1307.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
1308.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI CIBADAK
1309.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KEPAHANG
1310.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1311.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
1312.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINAK
1313.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
1314.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
1315.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
1316.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KOLAKA
1317.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BINTUHAN
1318.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1319.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
1320.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TABANAN
1321.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NGAWI
1322.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SERANG
1323.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU
1324.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SRAGEN
1325.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
1326.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TARAKAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1327.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
1328.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
1329.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TAHUNA
1330.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB
1331.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MESUJI
1332.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG
1333.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
1334.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GORONTALO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1335.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PONOROGO
1336.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
1337.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PARIGI
1338.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
1339.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
1340.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
1341.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RAHA
1342.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1343.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
1344.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
1345.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
1346.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KAB KEDIRI
1347.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
1348.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MASOHI
1349.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KALIANDA
1350.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB MALANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1351.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
1352.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
1353.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
1354.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CURUP
1355.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
1356.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG
1357.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
1358.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1359.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH
1360.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUMBER
1361.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MATARAM
1362.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
1363.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA METRO
1364.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN
1365.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA
1366.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA GRESIK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1367.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KALIANDA
1368.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
1369.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
1370.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
1371.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KLATEN
1372.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
1373.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
1374.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDINGPENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1375.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
1376.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
1377.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SERUI
1378.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SERANG
1379.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
1380.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
1381.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
1382.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1383.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN MILITER UTAMA
1384.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
1385.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI
1386.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
1387.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
1388.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
1389.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MANADO
1390.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA AMBON

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1391.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
1392.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
1393.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUMENEP
1394.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
1395.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
1396.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
1397.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANTUL
1398.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LAHAT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1399.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BIREUEN
1400.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
1401.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN
1402.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TUAL
1403.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BARABAI
1404.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SELONG
1405.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BATU LICIN
1406.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KAJEN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1407.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TOBELO
1408.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
1409.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
1410.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDINGPENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
1411.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MANADO
1412.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BOROKO
1413.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA UNAHA
1414.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RENGAT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1415.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG
1416.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI UNGARAN
1417.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
1418.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
1419.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
1420.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BALIGE
1421.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
1422.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1423.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA BUMI
1424.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
1425.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
1426.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI AMBON
1427.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
1428.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GARUT
1429.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
1430.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1431.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SLAWI
1432.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
1433.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BLORA
1434.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
1435.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
1436.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUMPENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
1437.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
1438.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1439.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGIL
1440.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
1441.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
1442.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
1443.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH
1444.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TEGAL
1445.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
1446.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1447.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
1448.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BATANG
1449.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG
1450.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
1451.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
1452.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN
1453.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
1454.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BARABAI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1455.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG
1456.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG
1457.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
1458.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
1459.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TUBAN
1460.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG
1461.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
1462.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KENDARI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1463.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MAROS
1464.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN
1465.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PALU
1466.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
1467.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
1468.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
1469.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
1470.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PINRANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1471.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
1472.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
1473.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
1474.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
1475.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
1476.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
1477.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BATU LICIN
1478.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1479.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI CIANJUR
1480.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO
1481.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MANNA
1482.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SAMBAS
1483.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
1484.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUNGKID
1485.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BEKASI
1486.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1487.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON
1488.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
1489.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
1490.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GIANYAR
1491.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
1492.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
1493.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN
1494.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1495.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO
1496.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
1497.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SURABAYA
1498.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SRAGEN
1499.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
1500.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK
1501.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI
1502.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1503.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA SAMBAS
1504.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MERAUKE
1505.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
1506.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BUNTOK
1507.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
1508.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
1509.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MOROTAI
1510.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1511.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
1512.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
1513.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA WONOSARI
1514.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TEBO
1515.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TARAKAN
1516.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
1517.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
1518.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1519.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
1520.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
1521.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA LEBONG
1522.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
1523.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
1524.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
1525.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PEMALANG
1526.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1527.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUMPENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT
1528.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
1529.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA JINAYAH MAHKAMAH SYARIAH ACEH
1530.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
1531.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BOGOR
1532.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JAMBI
1533.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAMUJU
1534.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANDUNG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1535.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TUBEI
1536.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
1537.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
1538.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
1539.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINTANG
1540.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
1541.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BATANG
1542.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA TATA USAHA MILITER PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1543.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
1544.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA RENGAT
1545.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
1546.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
1547.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI MALANG
1548.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
1549.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BLORA
1550.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1551.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KUDUS
1552.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
1553.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR
1554.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE
1555.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
1556.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
1557.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PONOROGO
1558.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1559.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KUDUS
1560.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
1561.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG
1562.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BIAK
1563.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GRESIK
1564.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
1565.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI POSO
1566.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1567.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA DEPOK
1568.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KEDIRI
1569.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
1570.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
1571.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA
1572.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PRAYA
1573.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TONDANO
1574.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1575.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
1576.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
1577.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BARABAI
1578.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
1579.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAROS
1580.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
1581.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
1582.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SINTANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1583.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
1584.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LANGSA
1585.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
1586.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA GARUT
1587.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BUOL
1588.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KETAPANG
1589.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
1590.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1591.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
1592.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
1593.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI JEMBER
1594.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMPANG
1595.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI MATARAM
1596.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA CIAMIS
1597.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LANGSA
1598.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1599.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
1600.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
1601.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAIAN
1602.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM MAHKAMAH SYARIYAH ACEH
1603.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARO BUNGO
1604.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SELONG
1605.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BIMA
1606.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LUWUK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1607.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
1608.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
1609.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BUKIT TINGGI
1610.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA NATUNA
1611.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI DEPOK
1612.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
1613.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KISARAN
1614.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI POSO

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1615.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
1616.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TERNATE
1617.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
1618.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA CIBINONG
1619.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA GORONTALO
1620.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA PADANG
1621.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PASURUAN
1622.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1623.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUDUS
1624.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
1625.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI PARIGI
1626.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MAMUJU
1627.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
1628.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG
1629.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
1630.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1631.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
1632.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SALATIGA
1633.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
1634.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
1635.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
1636.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
1637.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA DUMAI
1638.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1639.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
1640.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
1641.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
1642.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
1643.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MADIUN
1644.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MAJENE
1645.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BATAM
1646.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1647.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
1648.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA TALU
1649.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
1650.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
1651.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PRAYA
1652.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BOGOR
1653.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI SURABAYA
1654.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARI'AH;S-1 SYARI'AH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1655.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA
1656.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
1657.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
1658.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM;S-1 HUKUM BISNIS;S-1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN;S-1 HUKUM ISLAM KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINATAHAN;S-1 HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH);S-1 HUKUM KEPERDATAAN;S-1 HUKUM OTONOMI DAERAH;S-1 HUKUM PIDANA EKONOMI;S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 SYARIAH;S-1 MUAMALAT JINAYAT	1	0	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
TOTAL			4	0	



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI